



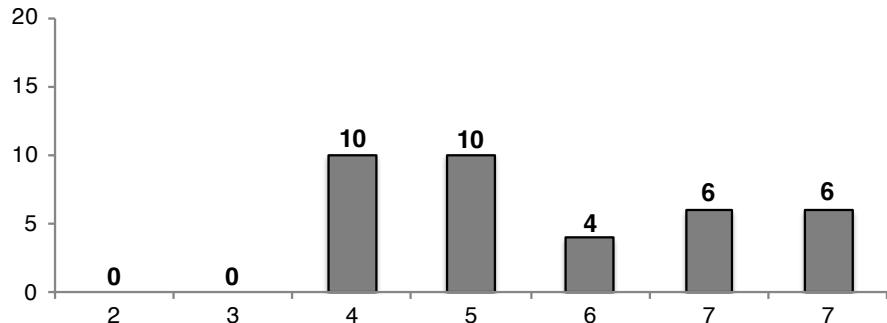
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(08 Agustus 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
5	6	6	0	0

Daily Statistic



Media Share

-

Influencers

-

Table Of Contents : 08 Agustus 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	08 Agustus 2025	Jawa Pos	Pemilik SHM Wajib Pasang Patok	6	Positive	Nusron Wahid, Ahmad Luthfi
2	08 Agustus 2025	Media Indonesia	Bupati Pati akan Tinjau Ulang Penaikan PBB	8	Positive	Henggar Budi Anggoro
3	08 Agustus 2025	Rakyat Merdeka	Bupati Pati Didemo, "Dijewer" Gubernur, Lalu Meminta Maaf	1	Positive	
4	08 Agustus 2025	Suara Merdeka	Kenaikan PBB 250 Persen Dikaji Ulang	1	Positive	
5	08 Agustus 2025	Suara Merdeka	91 Persen Lahan Pertanian di Jateng Masih Terjaga	9	Positive	
6	08 Agustus 2025	Radar Pekalongan	Demi Kedaulatan Pangan, Gubernur Jateng Minta Lahan Produktif Tetap Dipertahankan	5	Positive	

Title	Pemilik SHM Wajib Pasang Patok		
Media	Jawa Pos	Reporter	idr/ali
Date	2025-08-08	Tone	Positive
Page	6	PR Value	

KEMENTERIAN ATR/BPN

Pemilik SHM Wajib Pasang Patok

PURWOREJO - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025. Nusron menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga batas tanah miliknya masing-masing.

Gemapatas 2025 digelar serentak di 23 kabupaten/kota pada 8 provinsi, dengan pusat pelaksanaan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menteri ATR menegaskan, semua warga yang sudah memiliki sertifikat wajib memasang patok tanah. "Tujuannya agar tidak dicaplok oleh orang lain tanahnya," tegasnya usai berlangsungnya kegiatan di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kemarin (7/8).

Dengan gerakan ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia yang punya tanah

akan memasang patok di tapal batas tanah yang dimiliki. "Pemasangan patok tersebut harus dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah sekitarnya untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Patok itu dapat terbuat dari kayu, beton, maupun besi, yang terpenting adalah batas lahan ditandai secara fisik dan jelas," urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta seluruh bupati dan wali kota untuk mengintensifkan sosialisasi dan pelaksanaan pemasangan patok di wilayah masing-masing. "Sosialisasi ini penting dan pelaksanaanya penting. Nanti dari bupati bisa memerintahkan ke seluruh kepala desa agar pelaksanaan ini secara maksimal dilakukan," ujarnya. (idr/ali)



Nusron Wahid

Title	Bupati Pati akan Tinjau Ulang Penaikan PBB		
Media	Media Indonesia	Reporter	HT/E-2
Date	2025-08-08	Tone	Positive
Page	8	PR Value	

Bupati Pati akan Tinjau Ulang Penaikan PBB

- *Penaikan PBB-P2 mendapat protes keras warga Pati.*
- *Penduduk miskin sebesar 9,17% atau mencapai 116,84 ribu jiwa.*
- *Penaikan PBB harus disesuaikan dengan kemampuan daerah.*

AKHMAD SAFUAN
safuan@mediaindonesia.com

SETELAH banyak menerima desakan dan penolakan, Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo menyatakan akan meninjau ulang kebijakan penaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Sudewo menegaskan tidak semua warga akan dikenal PBB-P2 maksimal 250% karena yang di bawah 100% dan di bawah 50% jauh lebih banyak. "Namun, kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang," ujar Sudewo di Pati, kemarin.

Sudewo mengungkapkan lang-

kah kebijakan penaikan PBB-P2 hingga 250% tersebut didorong kebutuhan anggaran yang besar untuk pembangunan. Selain itu, dalam kepemimpinan pemerintahan saat ini banyak kekurangan sehingga dia minta maaf serta meminta warga Pati untuk dapat menahan diri.

Selain itu, Sudewo meminta maaf soal ucapannya yang siap didemo 50 ribu orang. Dia mengatakan dirinya tidak bermaksud menantang rakyatnya, tetapi hanya bentuk penegasan tetap akan menaikkan PBB-P2 tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya, '5.000 silakan, 50 ribu mas-

sa silakan'. Saya tidak menantang rakyat, sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Masak rakyat saya tak tantang?" kata Sudewo seperti dikutip dari akun Instagram @ pati.24jam.

MEMBEBANI RAKYAT

Penaikan PBB-P2 mendapat protes keras warga Pati karena kebijakan Pemkab Pati tersebut dinilai ugal-ugalan dan tidak melihat kondisi perekonomian saat ini.

"Penaikan PBB-P2 di Pati ini gila-gilaan. Warga Pati mayoritas petani keberatan atas kenaikan tersebut. Berapa sih, pendapatan petani? Tidak sebanding dengan pajak yang harus dibayar," ujar Kosim, warga Sukollo, Pati.

Keberatan juga diungkapkan Ahmad, 50, warga Kayen, Kabupaten Pati, bahwa kenaikan PBB-P2 cukup membuat warga terbebani.

Bahkan sebelumnya penaikan itu tidak hanya 250%, tetapi 500%.

"Saya mendapat tagihan PBB-P2 Rp1,3 juta. Saya kaget karena

tahun sebelumnya PBB-P2 hanya Rp179 ribu sehingga protes," ungkapnya.

Namun, setelah itu, lanjut Ahmad, dilakukan revisi hingga ada perubahan PBB-P2 yang harus dibayar Rp600 ribu, atau naik 250%.

Warga Batangan Muslimin, 45, juga mengeluhkan penaikan PBB-P2 tersebut. Menurut dia, beban pajak itu cukup terasa memberatkan bagi warga yang sebagian besar ialah buruh tani dan nelayan. Muslimin mengaku pada 2024 PBB-P2 rumah orangtua yang ditempatinya hanya Rp25 ribu, tetapi sekarang naik menjadi Rp144 ribu.

WARGA MISKIN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), jumlah warga miskin di Kabupaten Pati masih cukup besar. Hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, persentase penduduk miskin sebesar 9,17%, atau mencapai 116,84 ribu jiwa, menurun jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang sebesar 118,18 ribu jiwa.

Kepala BPS Kabupaten Pati Bob Setia Budi mengatakan garis kemiskinan di Kabupaten Pati pada Maret 2024 sebesar Rp559.499 per kapita per bulan. Namun, angka itu bertambah sebesar Rp26.954 per kapita per bulan, atau meningkat sebesar 5,06% jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp532.545.

"Angka kemiskinan itu sudah disampaikan Kepala BPS Kabupaten Pati kepada Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro," kata Bob.

JANGAN MERUGIKAN

Dalam menanggapi ketegangan yang terjadi di Pati, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyarankan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya agar dalam menaikkan PBB disesuaikan dengan kemampuan daerah itu sendiri, jangan sampai merugikan rakyat mereka.

"Jadi, penaikan PBB ini tidak boleh membebani masyarakat sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu, diturunkan pada saat itu," tambahnya.

Karena itu, Gubernur meminta dialog mengenai hal tersebut agar dapat dilakukan secara cepat dan jangan berlama-lama. "Setelah ada hasil dialog, disosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat semua tahu itu untuk masyarakat, dari masyarakat, dan oleh masyarakat," imbuhnya. (HT/E-2)

Title	Bupati Pati Didemo, "Dijewer" Gubernur, Lalu Meminta Maaf		
Media	Rakyat Merdeka	Reporter	UMM
Date	2025-08-08	Tone	Positive
Page	1	PR Value	

Naikkan Pajak 250%

Bupati Pati Didemo, "Dijewer"

Gubernur, Lalu Meminta Maaf

BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo jadi sorotan setelah didemo warganya karena naikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai 250 persen. Akibat kebijakannya yang merugikan warga ini, Bupati Sudewo "dijewer" Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Sang Bupati pun, langsung meminta

maaf.

Meletusnya gelombang protes warga setelah pernyataan Bupati Sudewo viral di media sosial. Dalam video singkatnya, Sadewo mengaku tidak takut dengan demonstrasi yang dilakukan warga terkait keputusannya naikkan PBB hingga 250 persen.

"Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, terus maju," tantang Sudewo.

Mendapat tantangan dari bupati, warga yang sejak awal menolak

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6

Ahmad Luthfi Minta Kenaikan PBB 250% Dibatalkan

Bupati Pati Didemo

... DARI HALAMAN 1

naiknya PBB, bereaksi keras. Lewat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, para warga secara sukarela mengumpulkan donasi untuk persiapan demo akbar pada 13 Agustus mendatang.

Posko donasi didirikan di depan gerbang Kantor Bupati. Para warga secara sukarela mengirimkan bantuan berupa air mineral dan makanan ringan ke posko donasi. Banyaknya bantuan yang datang, membuat posko langsung penuh. Tumpukan dus-dus air mineral setinggi 1,5 meter bahkan berjejer di jalanan.

Ketegangan memuncak pada demonstrasi yang terjadi pada Selasa (5/8/2025) siang. Petugas Satpol berupaya membubarkan posko donasi dan peseta demo secara represif. Tak hanya membubarkan bantuan yang sudah dikumpulkan, dari warga diajakut personel Satpol PP menggunakan tuk.

Massa yang tidak terima langsung mengejar truk dan berusaha merebut kembali barang-barang yang telah diangkut. Sejumlah peserta aksi balikan naik ke truk dan melempar kardus ke jalanan sebagai bentuk protes.

Kericuhan makin memanas ketika Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pati, Riyoso, muncul di lokasi. Adu mun-

lut antara massa dan petugas semakin singit, hingga akhirnya Riyoso ditarik mundur oleh aparat ke kantor Bupati demi alasan keamanan.

Koordinator aksi, Supriyono, mengaku kecewa atas tindakan Pemda Pati yang represif terhadap gerakan warga.

"Donasi ini dari masyarakat. Kita sudah kirimi surat perintahuan ke Pak Kapolda Resta dan Bupati sejak awal, tapi justru disita begitu saja," kata Supriyono.

IA menilai pembubaran posko sebagai bentuk arogansi Pemda terhadap suara masyarakat. Supriyono menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan penggalangan dana dan bersiaga untuk aksi damai pada 13 Agustus mendatang.

"Kami tidak akan mundur. Kami akan tetap menggelar demo pada 13 Agustus mendatang. Tak hanya jumlah massa yang jauh lebih besar," tegas Supriyono.

Dia mengklaim, demo pada 13 Agus-

tus mendatang akan diikuti puluhan ribu orang. Tak hanya warga, sekitar 5 ribu santri dari berbagai penjurui Pati juga akan ikut bergabung.

Tingginya tensi yang terjadi di Pati, sampai juga ke tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung menyentil Sudewo karena bikin gaduh. Luthfi meminta Sudewo mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan kenaikan PBB 250 persen.

"Sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait public complaint wilayahnya. Itu untuk menjaga kondusivitas," ujar Luthfi kepada wartawan di Semarang, Kamis (7/8/2025).

Tak cuma meminta membuka dialog, Luthfi juga mendesak Sudewo untuk memutuskan tarif PBB.

"Perintah saya jelas, dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu ditununkan pada saat itu juga," ujar mantan Kapolda Jawa Tengah itu.

Di tingkat pusat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa polemik kenaikan tarif PBB di Pati. "Lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Ijen (Inspektorat Jenderal) untuk mengecek, itu saja, dasarnya apa," ucap Tito.

Bupati Minta Maaf

Setelah bikin heboh dan meresahkan warga, Bupati Sudewo akhirnya minta maaf. Politisi Partai Gerindra itu berjanji akan menitip uang kebijakan tersebut.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu acara pemerintah. Kami tidak melarang penggalangan dana," ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Sudewo juga menanggapi viralnya video dirinya yang dianggap menantang rakyat. "Saya tidak menantang rakyat. Masak rakyatku kutangant? Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo ini murni aspirasi dan tidak ditunggangi pihak tertentu," kata Sudewo.

Sudewo menjelaskan bahwa kenaikan

PBB hingga 250 persen adalah kenaikan maksimal, dan tidak berlaku untuk semua tanah atau bangunan. Sebagian besar warga mengalami kenaikan di bawah 100 persen, bahkan ada yang kurang dari 50 persen.

"Ini akibat dari 14 tahun tanpa kenaikan pajak. Padahal undang-undang mengamanatkan kenaikan bisa dilakukan tiap tiga tahun," ungkapnya.

Penyesuaian ini, lanjut Sudewo, penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati hanya berkontribusi 14 persen terhadap APBD, sementara belanja pegawai menembus 47 persen. Hal ini menyisakan ruang yang sangat terbatas untuk pembangunan.

"Untuk itu, kami perlu meningkatkan PAD agar pembangunan tetap berjalan. Namun jika ada masyarakat yang merasa keberatan, khususnya yang kenaikannya signifikan, kami turunkan untuk meninjau ulang. Saya tidak keras kepala," pungkas Sudewo. ■ UMM

Title	Kenaikan PBB 250 Persen Dikaji Ulang		
Media	Suara Merdeka	Reporter	
Date	2025-08-08	Tone	Positive
Page	1	PR Value	H49, fid, ekd-64

Kenaikan PBB 250 Persen Dikaji Ulang

■ **Bupati Pati Memohon Maaf**
■ **Gubernur Minta Dievaluasi**

PATI- Bupati Pati H Sudewo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen. Ia menyatakan terbuka terhadap tuntutan warga dan siap meninjau ulang kebijakan itu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (7/8), sebagai respons atas unjuk rasa dan kerusuhan yang mengemuka di tengah masyarakat sejak awal Agustus.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya keriuhan pada Selasa (5/8). Kami sama sekali tidak berniat melakukan perampasan barang milik masyarakat. Hanya ingin memindahkan atribut agar tak mengganggu rangkaian Kirab Boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati dan kegiatan 17 Agustus," ungkap Sudewo.

Ia juga meluruskan pernyataan sebelumnya yang dianggap menantang masyarakat untuk berdemo. Sudewo

Ahmad Luthfi

SM/humas jateng



Kenaikan..

(Sambungan him 1)

kenaikan bantuan sosial awal masih memimpinnya... ia menyatakan siap menerima kritik, saran, dan masukan dari seluruh elemen masyarakat demi perbaikan tata kelola pemerintahan di kabupaten Pati.

Meski dihadapkan pada kritik, Sudewo menegaskan komitmennya untuk terus membangun Kabupaten Pati.

Menurutnya, dalam sepekan terakhir segerai pembayaran PBB P2 RAA Soewondo dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

menegaskan tidak ada niatan sedikit pun untuk menghadapi rakyatnya secara konfrontasi. Ia juga memohon maaf atas pernyataannya, sekitar 45.000 silakan, 50 ribu silakan. Itu bukan tantangan. Mosok rakyatku tak tantang. Saya milik rakyat, ujarnya.

Mengenai substansi kebijakan PBB P2, Sudewo menjelaskan kenaikan hingga 250 persen merupakan batas maksimal yang berlaku pada kategori tertentu, bukan berlaku merata bagi seluruh wajib pajak. IYANG kena di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen itu jauh lebih banyak, i jelasnya.

Kendati demikian, ia menyatakan siap melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif jika ada masyarakat yang merasa terbebani. Komitmen ini disampaikannya sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik yang berkembang secara luas. Hingga awal Agustus, pembayaran PBB P2 telah mencapai hampir 50 persen, yang menurutnya menunjukkan partisipasi warga masih cukup tinggi di tengah situasi polemik.

Sudewo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan demonstrasi atau penggalangan dana guna mendukung aksi. Namun ia mengingatkan

agar aspirasi disampaikan dengan terbuka dan tidak ditutup-tutup oleh kepentingan lain.

SiSilakan menyampaikan aspirasi. Saya hanya ingin demo itu berjalan lancar dan murni dari rakyat, bukan ada kepentingan lain, katanya. Sebagai bagian dari refleksi, Bupati Pati yang juga mantan anggota DPR RI

(Bersambung
him 5 kol 1)

"Saya ingin Pati lebih baik. Infrastruktur dan layanan publik kami benahi agar masyarakat merasakan manfaat nyata. Mohon dukungan dari seluruh elemen dan tamunya. Sudewo mengajak seluruh masyarakat menulis diri dan menciptakan iklim yang kondusif demi kelanjutan pembangunan di Bumi Mina Tani."

Kaji Ulang

Setelah lima hari yang lalu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau kembali kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan PBB P2 yang berlaku di seluruh daerah.

"Prinsipnya, disesuaikan dengan kemampuan daerah, tapi juga jangan sampai membuat rakyat. Maka saya suatu ketika dilakukan evaluasi dan kajian," tegaskan Luthfi.

Itu bukan tanggung jawab Pemkab Pati saja, tetapi juga Pemda dan Pemkab.

Dalam keterangannya usai menghadiri acara Pencanangan Gempatas di

Purworejo, Kamis (7/8), Gubernur Luthfi menegaskan bahwa kebijakan apapun yang menyangkut beban ekonomi rakyat, termasuk pajak, harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kondisi fiskal daerah.

"Prinsipnya, disesuaikan dengan kemampuan daerah, tapi juga jangan sampai membuat rakyat. Maka saya suatu ketika dilakukan evaluasi dan kajian," tegaskan Luthfi.

Itu bukan tanggung jawab Pemkab Pati saja, tetapi juga Pemda dan Pemkab.

Dalam keterangannya usai menghadiri acara Pencanangan Gempatas di

masyarakat, Luthfi meninjau kembali kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang mulai diberlakukan sejak Mei 2025 oleh Pemkab Pati, memang untuk mendukung pembangunan.

Banyak warga, khususnya petani dan masyarakat petani, menyebut tarif baru terlalu memberatkan. Pemerintah daerah berdihulih bahwa penyesuaian dilakukan karena tarif PBB tidak mengikuti perubahan selama 14 tahun terakhir.

Namun bagi Luthfi, besaran kenaikan perlu dikaji lebih adil dan proporsional, la menyaranakan agar Pemkab Pati mempertimbangkan lembaga independen atau akademisi untuk melakukan kajian yang obyektif.

"Segera lakukan koordinasi. Libatkan pihak ketiga untuk kajian

akademik, kirimkan juga ke provinsi untuk ditelusur, apakah kenaikan PBB itu wajar atau tidak," sarannya.

Gubernur juga menyentori lemahnya soal kesiapan dari Pemkab Pati dalam menyikapi. Banyak warga belum memahami dasar kebijakan dan proses perhitungannya. Menurunnya, hal ini bisa memicu kesalahan-pahaman yang berujung konflik.

Jangan berlama-lama. Jangan sampai rakyat tidak paham dan akhirnya sulit salah paham. Ini bisa jadi pemula permasalahan besar," ucap Luthfi.

Dengan sikap tegaz ini, Gubernur Luthfi berharap polemik konflik PBB-P2 di Pati tidak berlarut-larut dan bisa segera menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. (H49,fid,ekd-64)

Title	91 Persen Lahan Pertanian di Jateng Masih Terjaga		
Media	Suara Merdeka	Reporter	fid,ekd-44
Date	2025-08-08	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

91 Persen Lahan Pertanian di Jateng Masih Terjaga

PURWOREJO - Provinsi Jawa Tengah mencatatkan capaian gemilang dalam menjaga kelestarian lahan pertanian.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 91 persen lahan pertanian abadi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi.

Angka tersebut jauh di atas target nasional sebesar 87 persen dan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi secara nasional.

"Jawa Tengah ini luar biasa. Masih surplus 4 persen dari target nasional. Banyak provinsi lain yang sudah lampu merah, tapi Jateng justru jadi contoh. Tepuk tangan buat Pak Gubernur," ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan pencanangan Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Purworejo, Kamis, (7/8).

Nusron juga menyebut,

selama empat tahun terakhir (2021-2025) alih fungsi lahan di Jawa Tengah hanya 1.218 hektare dari total lebih satu juta hektare lahan pertanian.

Angka itu merupakan salah satu yang paling rendah di Indonesia.

"Alih fungsi lahannya kecil sekali, hanya seribuan hektare. Itu luar biasa. Banyak provinsi sudah kehilangan sawahnya. Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, bahkan Bali, sudah di bawah rerata," ungkap Nusron.

Zona Hijau

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatan yang sama menyampaikan permintaan khusus kepada Menteri ATR/BPN, agar zona hijau dan lahan produktif di provinsinya tetap dijaga dan tidak mudah diubah peruntukannya.

"Luas wilayah Jawa Tengah mencapai hampir 3,5 juta hektare dan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya adalah zona hijau. Kami harapkan ini tidak diubah jadi zona pembangunan. Ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan," kata Luthfi.

Dia menambahkan, pada 2024 Jawa Tengah menyumbang 18,8 persen dari total produksi pangan nasional dan menjadi penopang utama program swasembada pangan.

Angka itu merupakan salah satu yang paling rendah di Indonesia.

"Kami ingin Jawa Tengah tetap menjadi *ijo royo-royo*, daerah subur yang memberi kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional," ungkap Luthfi.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga kembali menggencarkan langkah percepatan tertiib administrasi pertanahan melalui pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) Tahun 2025. Jawa Tengah didapuk sebagai lokus utama pelaksanaan, dengan pusat kegiatan di Lapangan Candingasingan, Kabupaten Purworejo.

Kegiatan itu dilakukan secara serentak di 23 kabupaten/kota pada delapan provinsi.

Untuk Jawa Tengah dilaksanakan di Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo.

(fid,ekd-44)

Title	Demi Kedaulatan Pangan, Gubernur Jateng Minta Lahan Produktif Tetap Dipertahankan		
Media	Radar Pekalongan	Reporter	Anang
Date	2025-08-08	Tone	Positive
Page	5	PR Value	



PERTAHANKAN - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), agar zona hijau dan lahan produktif di wilayahnya terus dipertahankan.

Demi Kedaulatan Pangan, Gubernur Jateng Minta Lahan Produktif Tetap Dipertahankan

PURWOREJO - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), agar zona hijau dan lahan produktif di wilayahnya terus dipertahankan. Sebab, provinsi ini

dijadikan sebagai hambatan pangan nasional.

"Luas wilayah Jawa Tengah mencapai hampir 3,5 juta hektare, dan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya adalah zona hijau. Kami harapkan ini tidak diubah

jadi zona pembangunan. Ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan," kata Luthfi dalam kegiatan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gempatas) 2025 di Kabupaten Purworejo pada

Kamis, 7 Agustus 2025. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 91 persen lahan pertanian abadi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi. Angka tersebut jauh di atas target nasional sebesar 87 persen, dan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi secara

nasional.

"Jawa Tengah ini luar biasa. Masih surplus 4 persen dari target nasional. Banyak provinsi lain yang sudah lampu merah, tapi Jateng justru jadi contoh," kata Menteri ATR/BPN Nus-

ron Wahid dalam sambutannya.

Nusron juga menyebut, lahan pertanian di Jateng yang berjadi alih fungsi lahan merupakan salah satu yang paling rendah di Indonesia. (Anang)